



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULYAN IMANSYAH
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 215894

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 874.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI SUV/ECLIPSE CROSS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 384.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO BRIO RS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 221.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 567.040.400**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.084.238.645**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 7.125.279.045

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.125.279.045

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.